

## ISU LAUT CHINA SELATAN: EKSPANSI CHINA DAN PENTINGNYA KELANJUTAN DIPLOMASI

7

Simela Victor Muhamad

### Abstrak

*Kehadiran China yang semakin ekspansif di Laut China Selatan (LCS) perlu diikuti perkembangannya, karena hal ini berkaitan dengan stabilitas dan perdamaian kawasan. Hal tersebut dibahas secara singkat melalui tulisan ini, untuk mengetahui mengapa China melakukan kebijakan ekspansif di LCS dan mendapatkan banyak penentangan serta bagaimana seharusnya hal itu disikapi oleh masyarakat internasional, khususnya ASEAN. Kebijakan ekspansif China di LCS merupakan bagian dari kepentingan strategis China. Namun hal itu berpotensi menimbulkan konflik terbuka karena tidak sejalan dengan hukum internasional dan mendapat penentangan, tidak saja dari negara-negara pengklaim LCS lainnya, tetapi juga dari AS yang menjadi rival utama China di kawasan. Konflik terbuka yang terjadi di LCS akan mengancam stabilitas kawasan sehingga negara-negara di kawasan, termasuk yang tergabung dalam ASEAN, harus mencegah hal itu melalui jalan diplomasi. Diplomasi LCS tidak saja dilakukan oleh para diplomat dari kalangan eksekutif, tetapi perlu juga didukung oleh parlemen melalui aktivitas diplomasi parlemen.*

### Pendahuluan

Situasi di Laut China Selatan (LCS) kembali menyita perhatian media akhir-akhir ini. *South China Morning Post* pada 1 Maret 2021 memberitakan perihal ketegangan yang kembali terjadi di LCS menyusul latihan militer besar-besaran yang dilakukan China sebagai respons terhadap peningkatan aktivitas kapal dan pesawat pengintai Amerika Serikat (AS) di sekitar perairan LCS (scmp.com., 1 Maret 2021). Latihan

militer China tersebut melibatkan kapal perusak berpeluru kendali Yinchuan, kapal fregat berpeluru kendali Hengyang, kapal pendaratan dermaga amfibi Wuzhistan, dan kapal pendukung Chagan Hu. Sepekan sebelumnya, setidaknya 10 pesawat pembom China, termasuk pesawat H-6J milik Angkatan Laut China yang paling canggih, juga mengambil bagian dalam latihan serangan maritim di perairan LCS setelah peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut



(Kontan.co.id., 27 Februari 2021).

Terjadinya eskalasi ketegangan di LCS memang tidak bisa dilepaskan dari adanya perseteruan antara China dan AS, dua kekuatan besar di kawasan, yang memiliki kepentingan strategis di perairan yang sedang dipersengketakan itu. Ekspansi China yang cukup masif di LCS, dengan pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang mendapat respons negatif dari negara-negara pengklaim LCS lainnya dan AS, semakin membuat situasi LCS tidak kondusif. Menarik kemudian untuk dibahas, mengapa China melakukan kebijakan ekspansif di LCS dan mendapatkan penentangan, tidak saja dari negara-negara pengklaim LCS lainnya tetapi juga dari AS, dan bagaimana seharusnya situasi yang tidak kondusif di LCS ini disikapi oleh masyarakat internasional, khususnya ASEAN (termasuk Indonesia)?

## Kepentingan Strategis China

Kehadiran China yang semakin ekspansif di LCS dapat dimaknai sebagai bagian dari kepentingan strategis China untuk mengamankan wilayah perairan yang sedang dipersengketakan itu. China mengklaim 80 persen perairan LCS menjadi miliknya. Namun, sebagaimana diketahui, hingga saat ini kepemilikan sebagian wilayah perairan LCS masih dipersengketakan oleh sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina), Taiwan, dan China, dan belum berhasil dicarikan solusi damai. China, yang kini tampil sebagai kekuatan besar di kawasan, mengabaikan hukum laut internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) dalam menyikapi sengketa di LCS yang melibatkan dirinya.

China, sebagaimana pernah diungkap media, pada tahap awal



**Gambar 1. Foto Citra Satelit Pangkalan Militer China di Kawasan LCS**

Sumber: CSIS.

ekspansi di LCS, membangun pulau-pulau buatan di sekitar Kepulauan Spratly untuk keperluan sarana militernya, dan hal tersebut telah memberi kekuatan tambahan bagi negara itu untuk membuat negara-negara lain menjauhi LCS (The Jakarta Post, 26 Februari 2021). *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), lembaga *think tanks* yang berbasis di Washington D.C., AS, pernah mengungkap foto citra satelit yang menunjukkan pembangunan pangkalan militer China di LCS (lihat gambar-1). Di kawasan itu, China telah membangun tempat penampungan rudal dan infrastruktur militer lainnya.

Selain fasilitas militer, dan sebagai bukti bahwa LCS telah menjadi bagian dari kepentingan strategisnya, otoritas China juga telah membangun fasilitas pendukung lain. Sebuah laporan baru dari *US Naval War College* menyatakan bahwa China telah membangun kota seluas 800 ribu mil persegi yang dinamai Shansa dan luasnya 1.700 kali luas New York City (cnbcindonesia.com., 21 Februari 2021). Kota yang dibangun di Pulau Woody sejak 2012 itu dalam versi China berada dalam lingkup *nine-dash line* atau sembilan garis putus-putus (yang tidak dikenal dalam hukum internasional), batas imajiner yang dibuat China untuk menguasai LCS.

Pembangunan “kota pulau” itu dapat dimaknai sebagai langkah lanjutan multifase China untuk mendeklarasikan zona pengecualian LCS, termasuk zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) yang secara efektif akan mengubah perairan internasional menjadi

perairan internal China. Hal tersebut semakin menegaskan adanya kepentingan strategis China dengan kebijakan ekspansinya di LCS.

### **Penentangan atas Ekspansi China**

Langkah China yang semakin ekspansif di LCS bukan tanpa penentangan. Negara-negara yang bersengketa teritorial dengan China di LCS menentang keras langkah ekspansif China tersebut, karena dianggap dapat menghambat upaya diplomasi (yang kini terhenti) dalam penyelesaian sengketa LCS. Putusan Mahkamah Arbitrase PBB di Den Haag soal LCS pada 2016 yang mengabulkan keberatan Filipina atas klaim dan aktivitas China di LCS, bisa dipandang sebagai bentuk penentangan negara-negara yang bersengketa dengan China di LCS.

Penentangan keras lainnya datang dari AS, rival utama China di kawasan. Joe Biden, sepekan setelah dilantik sebagai Presiden AS yang ke-46, langsung mengirim peringatan keras kepada China dengan memerintahkan Armada Pasifik AS yang dipimpin kapal induk USS Theodore Roosevelt, memasuki perairan LCS (cnnindonesia.com., 28 Januari 2021). Biden menegaskan dukungan AS untuk para sekutunya (Jepang, Korea Selatan, Taiwan) dan juga negara-negara yang bersengketa teritorial dengan China di LCS. AS, di bawah kepemimpinan Biden, menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah *status quo* di wilayah-wilayah yang masih dipersengketakan. Ini artinya AS, dengan armada perangnya, dan sebagai bagian dari kemitraan keamanan dengan sekutunya di

kawasan, bisa saja berkonflik dengan China di LCS.

Potensi konflik yang terjadi bisa saja meluas, tidak saja antara AS dan China, tetapi bisa juga melibatkan kekuatan ekstra kawasan yang menjadi sekutu AS dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Inggris dan Perancis telah mengirimkan armada tempur lautnya ke perairan itu, yang akan disusul dengan Jerman, sebagai bagian dari upaya AS dan sekutu NATO-nya itu untuk mencegah laju ekspansif China di LCS. Selain tiga negara itu, sebuah kapal perang angkatan laut Kanada juga berlayar melewati Selat Taiwan dalam perjalanannya untuk bergabung dalam latihan dengan angkatan laut Australia, Jepang, dan AS di LCS (cnbcindonesia.com., 9 Maret 2021).

### **Upaya Diplomasi Perlu Terus Dilakukan**

Sikap AS dan sekutunya yang menentang klaim sepihak China atas LCS, dan pada saat yang bersamaan kebijakan ekspansif China di LCS terus berlangsung, menjadi potensi bagi terjadinya konflik terbuka di kawasan itu, bahkan pernah dikhawatirkan bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Potensi konflik tersebut sangat mungkin terjadi, terlebih jika China tetap tidak bersedia untuk melakukan dialog secara jujur, mengakui hukum internasional (UNCLOS 1982), dan menghargai posisi negara lain yang bersengketa teritorial dengannya di LCS. Ekspansi China yang begitu masif di LCS, terutama dengan pembangunan infrastruktur militernya, bisa diartikan bahwa China memang ingin

mempertahankan klaim teritorialnya atas LCS.

Pendekatan realisme politik, dengan mengandalkan kekuatan militer, seakan menjadi pilihan utama China untuk mempertahankan klaim sepihaknya atas LCS. Bagi China, seperti tidak ada “kata mundur” untuk memiliki LCS, dan hal itu bisa saja diartikan bahwa untuk menyelesaikan sengketa teritorial di LCS tidak mungkin lagi dilakukan melalui jalan perundingan (diplomasi). ASEAN, yang dalam beberapa tahun lalu begitu aktif mengambil peran dalam pencarian solusi damai atas isu LCS, belum terlihat lagi perannya. Terakhir dalam KTT ASEAN bulan Juni 2020 yang dilakukan secara virtual, Indonesia mendorong negosiasi mengenai kode tata perilaku (*Code of Conduct/CoC*) Laut China Selatan yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, dapat segera dilanjutkan.

Meskipun tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di LCS, Indonesia harus mengupayakan negosiasi CoC dapat menjadi kunci penyelesaian konflik. Indonesia, bersama ASEAN, perlu mengirim pesan kepada semua pihak untuk berkontribusi pada penciptaan stabilitas dan perdamaian di wilayah perairan tersebut. ASEAN harus menunjukkan soliditas dan penghormatannya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan Putusan Mahkamah Arbitrase PBB mengenai pelanggaran kedaulatan Filipina di LCS oleh China.

Ini artinya, jalur diplomasi dan perundingan yang menghormati

hukum internasional, meski tidak mudah dilakukan ketika berhadapan dengan kepentingan China, perlu dibuka kembali dan terus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa LCS. Upaya untuk mendorong kembali aktivitas diplomasi dalam kerangka penyelesaian sengketa LCS secara damai tidak saja perlu dilakukan oleh aktor negara yang diwakili oleh para diplomat dari kementerian luar negeri, tetapi juga melalui jalur diplomasi parlemen. Para anggota parlemen, melalui forum-forum antarparlemen seperti *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, juga perlu menggalang sikap bersama untuk terus menyuarakan pentingnya jalur diplomasi dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa LCS.

### Penutup

Ekspansi China di LCS, meskipun hal itu merupakan kepentingan strategis China, berpotensi menimbulkan konflik terbuka, tidak saja antara China dengan negara-negara pengklaim LCS lainnya, tetapi juga dapat melibatkan negara besar lain, dalam hal ini AS yang menjadi rival utama China di kawasan. Konflik terbuka yang terjadi di LCS akan mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan, dan oleh karena itu, negara-negara di kawasan, termasuk yang tergabung dalam ASEAN, harus mencegah hal itu melalui jalan diplomasi dan perundingan untuk menyelesaikan sengketa LCS. Parlemen, melalui berbagai forum antarparlemen, perlu menjadi bagian dalam menyuarakan pentingnya penyelesaian damai untuk menyelesaikan sengketa LCS.

### Referensi

- “Ramai-ramai AS & Sekutu ‘Kepung’ China di Laut China Selatan”, *cncindonesia.com.*, 9 Maret 2021, <https://www.cncindonesia.com/news/ramai-ramai-as-sekutu-kepung-china-di-laut-china-selatan>, diakses 9 Maret 2021.
- “Respons Amerika, 10 pembom China gelar latihan serangan rudal dengan target maritim”, *Kontan.co.id.*, 27 Februari 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/respons-amerika-10-pembom-china-gelar-latihan-serangan-rudal-dengan-target-maritim>, diakses 1 Maret 2021.
- “Sansha, Kota ‘Rahasia’ di LCS yang Luasnya 1.700 X New York”, *cncindonesia.com.*, 21 Februari 2021, <https://www.cncindonesia.com/news/20210221143736-4-224979/sansha-kota-rahasia-di-lcs-yang-luasnya-1700-x-new-york>, diakses 3 Maret 2021.
- “Sepekan Jadi Presiden AS, Biden Kirim Peringatan ke China”, *cnnindonesia.com.*, 28 Januari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210128130207-134-599469/sepekan-jadi-presiden-as-biden-kirim-peringatan-ke-china>, diakses 3 Maret 2021.
- “SCS: What’s China’s plan for its ‘Great Wall of Sand’?”, *The Jakarta Post*, 26 Februari 2021, hal. 6.
- “South China Sea: PLA starts month-long drill in push to modernise soldiers while resisting US operations”, *scmp.com.*, 1 Maret 2021, <https://www.scmp.com/news/china/military/article/3123576/south-china->

sea-pla-embarks-month-long-drill-push-modernise, diakses 1 Maret 2021.

"US destroyer sails in South China Sea", *The Jakarta Post*, 17 Februari 2021, hal. 6.



Simela Victor Muhamad  
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016); "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); "Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan" (bagian dari buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan "Proxy War dalam Konflik di Lebanon" (bagian dari buku *Proxy War di Timur Tengah*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.